

**SURAT KEPUTUSAN  
RENCANA KINERJA TAHUNAN  
DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2025**



**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**  
Jl.dr. Muwardi No.66 Gayam Sukoharjo  
Nomor Telpn (0271) 593015-593561 Sukoharjo



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Muwardi No. 66 Sukoharjo, Kode Pos 57514

Telp. ( 0271 ) 593015 Fax (0271) 593561

Website: <https://dkk.sukoharjokab.go.id> Email: [dkk@sukoharjokab.go.id](mailto:dkk@sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**NOMOR : 440/ 333 / I / 2024**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)**

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

**TAHUN 2025**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO**

Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan adanya Rencana Kinerja Tahunan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Permenpan No. PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 200);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);



12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
13. Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 03 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan  
KESATU

: Menetapkan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini.

KEDUA

: Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian Program dan kegiatan Perangkat Daerah.

KETIGA

: Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU digunakan sebagai dasar untuk menyusun evaluasi pencapaian kinerja.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 7 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



**RENCANA KINERJA TAHUNAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025**

**Dinas Kesehatan**

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat yang meningkat</b>	Angka Harapan Hidup (AHH)	77.9 Tahun					
1	Menurunnya angka kesakitan dan kematian	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	93.00 Per 100.000 KH	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	NDR (Net Death Rate) adalah angka kematian 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar	20 %	72.523.652.646	Dinas Kesehatan
2		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	7.00 Per 1000 KH		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan bayi	100 %		
3		Angka Kematian Balita (AKBa)	8.00 Per 1000 KH		Persentase cakupan puskesmas dengan peningkatan kesehatan ibu	100 %		
4		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	95.00 %		Persentase Capaian UHC	95 %		
5		Ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	72.00 %		Persentase Fasyankes Lainnya terakreditasi	70%		
6		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	54.00 %		Persentase Fasyankes yang memberikan Layanan JKN	53 %		
7		Persentase Stunting	7.60 %		Persentase FKTL (Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut) / RS terakreditasi	86 %		
8					Persentase FKTP terakreditasi	12 %		
9					Persentase puskesmas dengan cakupan pelayanan kesehatan balita	100 %		
10					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan kerja	92 %		



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab	
						Target Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan Lingkungan	94 %			
12					Persentase Puskesmas dengan cakupan pelayanan Kesehatan olahraga	100 %			
13					Persentase Puskesmas dengan cakupan yan kesehatan pada kesehatan reproduksi	100 %			
14					Capaian pelayanan kesehatan pada lansia	100 %			
15					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan imunisasi dan surveilans	100 %			
16					Persentase Puskesmas dengan peningkatan pelayanan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	100 %			
17					Persentase Puskesmas dengan peningkatan perbaikan Gizi Masyarakat	100 %			
18					Persentase Puskesmas dengan Peningkatan Program Penyakit Menular	100 %			
24				1.02.02.2.01 - Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenanagan Daerah Kabupaten Kota	100 %	10.879.620.246		
25				1.02.02.2.02 - Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	100 %	608.361.000		
26					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer terakreditasi	40 %			
27					Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan terakreditasi	86 %			
28					Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya terakreditasi	90 %			
29					Persentase Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan tradisional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisional lainnya	40 %			

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30					Capaian Universal Health Coverage (UCI Desa/Kelurahan)	100 %		
31					Persentase pelayanan kesehatan pada penderita TBC	90 %		
32					Persentase Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Sesuai Standart	100 %		
33					Persentase kasus DBD yang ditangani di wilayah dalam kurun waktu 1 tahun	100 %		
34					Desa/Kalurahan yang terindikasi KLB ditangani < 24 jam	100 %		
35					Imunisasi lanjutan anak SD sederajat	98 %		
36					Imunisasi dasar lengkap	95 %		
37					Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif (Pencegahan dan Pengendalian Penyakit)	100 %		
38					Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100 %		
39					Pelayanan Kesehatan Penderita DM	100 %		
40					Pelayanan Kesehatan Penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa	100 %		
41					Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sesuai standar selama periode kehamilan (K4,K6 )	100 %		
42					Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	100 %		
43					Persentase pelayanan anak balita (Kesehatan Masyarakat)	100 %		
44					Persentase Pelayanan Kesehatan Lansia	100 %		
45					Prevalensi Wasting (Gizi kurang dan gizi buruk)	7 %		
46					Persentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	10 %		
47					Persentase Puskesmas yang melaksanakan Surveilans gizi	100 %		
48					Persentase puskesmas mampu tata laksana gizi buruk pada balita	60 %		



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
49					Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif	60 %		
50					Prosentase ketercapaian Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota (RSUD)	100 %		
69					Prosentase Capaian Pelayanan Kesehatan Lingkungan	100 %		
72					Prosentase Capaian Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	100 %		
79					Persentase pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	100 %		
89					Persentase Pasien TBC yang menyelesaikan pengobatan sampai dengan selesai pada jangka waktu tertentu	90 %		
90					1.02.02.2.03 - Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase ketercapaian Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	100 %	179.141.608
92					1.02.02.2.04 - Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitas kesehatan yang diterbitkan izin	100 %	722.407.400
94					1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Pemanfaatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikembangkan kompetensinya (Dinas Kesehatan)	100 %	1.200.872.400
96					1.02.03.2.01 - Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten Sukoharjo	95 %	57.952.200
97					1.02.03.2.02 - Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Ketercapaian Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber daya Manusia Kesehatan untuk UKP di wilayah Kabupaten/ Kota	100%	104.773.000
102				1.02.03.2.03 - Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1.038.147.200	



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
104				1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	persentase sarana pelayanan kefarmasian, alat kesehatan dan sarana produksi farmasi serta pangan yang berijin sesuai ketentuan	25 %	502.462.600	
105				1.02.04.2.01 - Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	25 %	112.022.800	
106				1.02.04.2.03 - Penerbitan Serti kat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	100 %	159.350.000	
107				1.02.04.2.04 - Penerbitan Serti kat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase sarana TPM yang diterbitkan Serti kat Laik Higiene	100 %	8.970.000	
108				1.02.04.2.06 - Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Persentase jumlah sarana IRTP berSPPIRT yang dibinwas	85 %	222.119.800	
109				1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa siaga aktif mandiri	49 63%	426.510.000	
110				1.02.05.2.01 - Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan dengan peningkatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan (KesMas)	66 %	126.660.000	
111				1.02.05.2.02 - Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Tatanan Rumah Tangga	90 %	94.347.000	



No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran	Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Penanggung jawab
						Target Kinerja	Anggaran	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
112				1.02.05.2.03 - Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kecamatan yang mempunyai Posyandu Mandiri > 27 %	100 %	205.503.000	
113	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78.00 angka	1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	102.550.628.000	
114				1.02.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	67.152.000	
115				1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	178.601.165.525	
116				1.02.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	128.520.000	
117				1.02.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	71.720.000	
118				1.02.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	641.122.996	
119				1.02.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	monitoring pemanfaatan prasarana dan alkes	100%	457.392.000	
120				1.02.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.852.033.344	
121				1.02.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	591.843.000	

Sukoharjo, 7 Januari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN SUKOHARJO



TRITUTIRAHAYU, SKM,M.Kes  
NIP. 197009021991032005